

**PESANTREN DAN POLITIK: PERAN DAN PENGARUH
DALAM PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

Oleh :

NUR AQIFAH

E111 13 002

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



**PESANTREN DAN POLITIK: PERAN DAN PENGARUH DALAM
PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

Oleh :

NUR AQIFAH

E111 13 002

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PESANTREN DAN POLITIK : PERAN DAN PENGARUH DALAM
PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan Oleh:

NUR AQIFAH
(E111 13 002)

Telah diperiksa dan diujikan
Makassar, 12 Agustus 2020

Menyetujui :

Pembimbing I

Drs. Phill.Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508118200811008

Pembimbing II

Haryanto, S.IP, M.A
NIP.198610082019031009

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik

Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP.196212311990031023



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

PESANTREN DAN POLITIK : PERAN DAN PENGARUH DALAM PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

NUR AQIFAH

E111 13 002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020

Menyetujui,

PANITIA UJIAN:

Ketua	: Dr. Phill. Sukri, S.IP., M. Si	(.....)
Sekretaris	: Haryanto, S.IP.MA	(.....)
Anggota	: Drs. H. Andi Yakub, M. Si., Ph.D	(.....)
Anggota	: Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si	(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nur Aqifah
NIM : E11113002
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pesantren dan Politik : Peran dan Pengaruh Dalam Pilperes 2019 di Kota Makassar”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut .

Makassar, 12 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,


(Nur Aqifah)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah *Rabb* semesta alam, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat meberinya petunjuk. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang paling dimuliakan, pemimpin orang-orang bertakwa, Muhammad bin Abdullah dan kepada para keluarga serta shahabat beliau. Amma ba'du.

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

Alhamdulillah, atas izin Allah akhirnya skripsi dengan judul *“Pesantren dan Politik : Peran dan Pengaruh Dalam Pilpres 2019 di Kota Makassar”* dapat selesai dengan tepat waktu meskipun masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun dengan tekad yang kuat dan dorongan dari orang-orang terdekat skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan harapan bisa memberi manfaat bagi program studi ilmu politik dan juga adik-adik yang nantinya akan meneliti dimasa yang akan datang.

Rampungnya skripsi ini sesungguhnya tidak luput dari segala kendala dan hambatan yang penulis temukan dilapangan, akan tetapi berkat adanya bantuan, masukan dan kerjasama dari berbagai pihak, semua kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan Syukran Jazakumullahu Khairan kepada semua pihak yang yang senantiasa

itu baik secara moril, moral maupun tenaga selama proses
nan tulisan ini, diantaranya:



1. **Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Departemen Ilmu Politik** yang telah membekali ilmu dan kemudahan-kemudahan kepada penulis dalam berbagai hal selama menjadi mahasiswa di Program Studi Ilmu Politik.
2. Bapak **Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si** selaku dosen pembimbing satu yang telah besabar dan bersedia meluangkan begitu banyak waktu, dan senantiasa memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Haryanto, S.IP, MA** selaku dosen pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, kesabaran dan bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D** selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si.**, selaku sekretaris penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga dalam perbaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh **staf pengajar departemen Ilmu Politik FISIP UNHAS. Prof. Dr. Armin, S.IP, M.Si., Prof Dr. Basyir SM.Ag., Dr. Andi Naharuddin, S.IP, M.Si., Dr. Gustiana, S.IP, M.Si., Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si., Nur Sakinah, S. IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si., Ummu Suci, S.IP, M.Si.**, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami dan teruntuk pembimbing akademik saya selama ini **Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si., dan Prof. Dr.Muhammad Kausar Bailusy Rahimahullah**, Smoga Allah senantiasa melapangkan kubur beliau dan membalas segala kebaikan atas ilmu yang telah diberikan.

Terima kasih kepada **staf akademik departemen Ilmu Politik FISIP UNHAS** Ibu **Hasna**, dan Pak **Adit**. Serta, seluruh **staf Akademik FISIP UNHAS** atas bantuannya kepada penulis selama proses pengurusan berkas dan keperluan persuratan dalam proposal maupun skripsi ini.



8. Terima kasih kepada Pihak Pesantren MDIA Bontoala khususnya **Elit Pesantren** yang telah membantu selama proses penelitian dan juga kepada para responden **Santri, Umat**, serta **Masyarakat** yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara

Ucapan Syukran Jazakumillahu Khairan juga penulis sampaikan kepada orang-orang yang telah berperan penting dan juga istimewa:

1. Kedua orang tua, **Muchlis** dan **Hudaya**, sebagai madrasah pertama dalam kehidupan yang telah banyak memberikan pelajaran serta dukungan moral maupun materil dalam kehidupan penulis, serta doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis agar menjadi anak yang berbakti dan meberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan semoga penulis dapat menjadi salah satu amal jariyah bagi mereka.
2. Saudara-saudaraku **Andis Wijaya, Sri rahayu**, dan **Resky Ananda**. Kalian adalah bagian dari kehidupan penulis, membersemai hingga dewasa, dan melalui pahit manisnya perjalanan hidup. Semoga *Allah* mengumpulkan kita sekeluarga di Jannah-Nya kelak.
3. Teman-teman **KONSOLIDASI 2013** yang sama-sama mengikuti proses perkuliahan selama lebih dari empat tahun.
4. Sahabat-sahabat ku dari **abidat 7** dan **Dazakirat 2**, Kak **Nengsih rahimahullah**, Kak **Jannah**, Kak **Ajirah**, Kak **Aida**, Kak **dwi**, Kak **Liska**, Kak **Rahmah**, **Ummu Bilal**, Kak **Asiqoh**, Kak **Asmi**, Kak **Uci**, Kak **Ayun**, Kak **Mardiyah**, Kak **Rahma Ummu Abduh**, **Hafshah**, **Aqilah**, **Dera**, **Akra**, **Alya**, **Ramlah**, **Hardiana**, **Resky**, **Wadda**, **usna**, **Hikmah**, **Azizah**, **Rahmah**, Dan teruntut **Murabbiyah**, **Guru** an sekaligus **Orang Tua** yang senantiasa mengajarkan kami ilmu



agama yang baik, Kak **Lutfah Djabrud**, dan Kak **Nurinsani Djunaedi**, Smoga kita senantiasa istiqomah dalam majelis-majelis ilmu.

5. Teruntuk Saudara yang tak Sedarah denganku **Andi Iffah Syahamah AZ**, dan juga kedua orang tua beliau **Prof. Dr. Drg. Andi Dzulkifli Abdullah, M.Kes dan Dr. Drg. Andi Asmidar Anas, M.Kes** atas bantuan moril dan materil nya kepada penulis dan telah menganggap penulis seperti anak sendiri.
6. Teruntuk Saudara-saudaraku yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu proses penyusunan skripsi ini, **Rasmi, Hasriana Thamrin, Marya Ulfa, dan Annisa Fitri**.
7. Terima kasih kepada Saudara-saudaraku yang sensntiasa memberikan dukungan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, **Akhawat FMDKI-Makassar, Drg. Siti Rahma Lukman, S.KG., Siti Harsita, S.Si., Siti Muthmainnah, SH., Mulyati Ismail, dan Rahmi Utami**.
9. Teruntuk teman-teman, sahabat, keluarga dan juga saudara-saudaraku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan kalian dengan sesuatu yang lebih baik, serta Allah mengumpulkan kita semua di Jannah-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu,penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat di bidang dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Makassar, 14 Juli 2020

Penulis



ABSTRAK

NUR AQIFAH,E111 13 002, ILMU POLITIK, Pesantren Dan Politik: Peran Dan Pengaruh Dalam Pilpres 2019 Di Kota Makassar Bulan April Sampai Juli 2020, Dibimbing oleh Sukri dan Haryanto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesantren terhadap pilihan politik santri, umat (orang tua santri) dan masyarakat dalam pilpres 2019 di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2020 yang berlokasi di Kota Makassar tepatnya di Pondok Pesantren MDIA Bontoala dan sekitarnya yang beralamat di Jl. Lamuru Kelurahan No.65, Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara mendalam kepada beberapa informan dilingkup Pondok Pesantren MDIA Bontoala yakni elit pesantren, santri, umat (orangtua santri) dan juga masyarakat sekitar pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun untuk menunjang data yang ada, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur, jurnal, dokumen, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pesantren terhadap pilihan politik santri, umat dan masyarakat pada pilpres 2019 di Kota Makassar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dimana elit pesantren dalam hal ini kiai pimpinan pesantren yang tidak mampu mengintervensi pilihan politik para santri, umat dan masyarakat dikarenakan beberapa hal yakni adanya loyalitas terhadap lembaga Nahdatul Ulama, kecenderungan politik terhadap salah satu pasangan calon kandidat, kuatnya doktrin keluarga dan dibandingkan dengan doktrin pesantren (elit) terkait pilpres serta kurangnya interaksi sosial yang dilakukan oleh Pondok Pesantren MDIA Bontoala terhadap umat dan masyarakat.

Kata Kunci: Pesantren, Politik, Santri, Umat, Masyarakat, Pilpres 2019



ABSTRACT

NUR AQIFAH,E111 13 002, POLITICAL SCIENCE, Pesantren and Politics: Role and Influence in the 2019 Presidential Election in Makassar City April until July 2020, supervised by Sukri and Haryanto.

This study aims to determine how the influence of pesantren on the political choices of students, students (parents) and the community in the 2019 presidential election in Makassar City.

This research was conducted in May to June 2020 which is located in Makassar City precisely at the MDIA Bontoala Islamic Boarding School and its surroundings which is located at Jl. Lamuru Kelurahan No.65, Bontoala Tua, Bontoala District Makassar City. The author obtained data from the results of in-depth interviews with several informants in the scope of the MDIA Bontoala Islamic Boarding School, namely the boarding elite, santri, parishioners (parents of santri) and also the community around the boarding school. This study used qualitative research methods. As for supporting existing data, the authors use primary secondary data from literary sources, journals, documents, and articles that are relevant to this study.

The results of this study indicate that the influence of pesantren on the political choices of students, people and society at the 2019 presidential election in Makassar City did not have a significant effect. Where the pesantren elite in this case the kiai leaders of the pesantren who are unable to intervene in the political choices of the students, the community and the community due to several things namely the existence of loyalty to the Nahdatul Ulama institution, political tendency towards one of the candidate pairs, the strength of the family doctrine and compared to the pesantren doctrine (pesantren) elite) related to the presidential election and the lack of social interaction carried out by the MDIA Bontoala Islamic Boarding School to the people and society



Keywords: Islamic Boarding School, Politics, Santri, Community, Presidential Election 2019

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pendekatan Institusionalisme Baru	11
2.2 Konsep Institusionalisme Baru	17
2.3 Politik Identitas	19
2.4 Partisipasi Politik	23
2.5 Pesantren	25
2.6 Santri	26
2.7 Umat	28
2.8 Masyarakat	29
.....ngka Pikir	31



BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	32
3.2.1 Tipe Penelitian	32
3.2.2 Jenis Penelitian	33
3.3 Informan Penelitian	34
3.3.1 Elit	35
3.3.2 Santri	35
3.3.3 Umat	36
3.3.4 Masyarakat	36
3.4 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	39
BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1 Sejarah Singkat Pesantren MDIA Bontoala	41
4.2. Visi dan Misi Pondok Pesantren MDIA Bontoala	45
4.2.1 Visi	45
4.2.2 Misi	45
4.3. Gambaran Umum Pondok Pesantren MDIA Bontoala	45
4.3.1 Profil Pesantren	45
BAB V Hasil Penelitian	51
5.1 Hasil Penelitian	51
5.1.1 Hubungan Pesantren dan Politik	51
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	58
5.2.1 Peran Pesantren MDIA Bontoala Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Santri Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar	68
5.2.2 Peran Pesantren MDIA Bontoala Dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Umat dan Masyarakat Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar	73



BAB VI Penutup	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	87
6.3 Kendala dan Limitasi Penelitian	89
6.3.1 Kendala Penelitian	89
6.3.2 Limitasi Penelitian	89
 DAFTAR PUSTAKA	 90



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kandidat Pilpres 2019.....	1
1.2 Hasil Perolehan Suara Pipres 2019	2
1.3 Hasil Pipres di Kota Makassar	4
3.1 Informan Penelitian	35
4.3 Gambaran Umum Pesantren MDIA Bontoala Makassar	45
4.3.2.1 Pendidikan Yang dibina Pondok Pesantren MDAI Bontoala.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pikir.....	31
3.2	Analisis Data Miles dan Habermen	40
5.1	Kunjungan Cawapres Kandidat 01 ke Pesantren Cipasung	56
5.2	Kunjungan Cawapres Kandidat 01 ke Pesantren Tebu Ireng.....	57
5.3	Kandidat Capres dan Cawapres 02 dengan Pimpinan Pesantren	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di seluruh provinsi tanpa terkecuali, dan pelaksanaan pilpres tahun 2019 ini hanya menghadirkan dua pasangan kandidat, yakni sebagai berikut;

Tabel 1.1 Kandidat Pilpres 2019

No.	Pasangan Kandidat	Partai Pengusung
1.	Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin	PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, NASDEM, HANURA, PSI, PERINDO, PKPI
2.	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	GERINDRA, PKS, PAN, DEMOKRAT, BERKARYA, GARUDA

Berdasarkan tabel di atas, pasangan nomor urut 1 yakni petahana dan nomor urut 2 oposisi. Pasca pelaksanaan pilpres 2019 menunjukkan pasangan kandidat nomor urut 1 berhasil memenangkan



kontestasi tersebut. Sebagaimana hasil dari perolehan suara pilpres berikut;

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pilpres 2019

No.	Pasangan Kandidat	Perolehan Suara
1.	Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin	55,5%
2.	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	45,5%

Pada perjalanannya, pilpres 2019 merupakan kontestasi politik yang menyita banyak perhatian. Setiap pasangan kandidat yakni Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Purn. H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) berlomba-lomba dalam menggalang simpati dan dukungan dari mayoritas kelompok Islam. Bahkan di dalam perjalanan kampanye, kedua pasangan kandidat ini silih berganti mendatangi pesantren untuk meminta doa restu dan juga dukungan dari para kiai maupun ustadz yang dianggap memiliki basis massa yang kuat.

Pada pilpres-pilpres sebelumnya, pesantren juga selalu menjadi incaran setiap calon kandidat, salah satunya adalah Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang kembali mencalonkan diri untuk maju dikontestasi pilpres 2009, dimana SBY berkeinginan untuk menyerap aspirasi kaum santri secara simbolik sehingga tak lupa pula menghadiri acara Jambore Nusantara di Jatinangor, Jawa Barat. Jambore yang berlangsung



15-20 Juni 2009 lalu ini diikuti oleh 6.000 santri dari 800 pesantren se-Indonesia pada kala itu.¹

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan formal yang berbasis keagamaan dengan memiliki jumlah santri yang cukup banyak, dipandang penulis sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti. Sehingga pada kesempatan ini penulis menelusuri secara mendetail terkait bagaimana peran dan pengaruh pesantren pada pilpres 2019 di kota Makassar khususnya pondok pesantren yang dikelola oleh Nahdatul Ulama (NU).

Adapun pondok pesantren yang dikelola oleh NU itu sendiri adalah sebagai berikut;

1. MDIA Bontoala,
2. MDIA Taqwa,
3. Ponpes An-Nadlah Makassar,
4. Ponpes Multidimensi Al-Fakhriyah,
5. Ponpes Faqihul Ilmi,
6. Madrasah As'adiyah 149,
7. MADDI Galesong Baru,
8. Ponpes Ulul Albab, dan
9. Ponpes Tahfizul Qur'an Al-Imam Ashim Kampus 2 Antang.

Pesantren tersebut tidak dibawah langsung oleh lembaga NU

dan Kementerian Agama. Akan tetapi pesantren tersebut bernuansa

¹ Ad Akbar, *Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara diyah, Makassar*. Skripsi, Makassar, 2012, hal. 10



NU dikarenakan pengurus yayasan, pembina pesantren, dan pemilik pesantren tersebut adalah sebagian besar pengurus NU baik NU kota Makassar maupun NU wilayah Sulawesi Selatan.² Setiap pondok pesantren memiliki perbedaan masing-masing meskipun secara umum dikelola oleh kader NU. Perbedaan yang nampak dari beberapa pondok pesantren tersebut yaitu dari segi santri yang mondok dan tidak mondok.

KH. Ma'ruf Amin pernah menghadiri acara silaturahmi dengan pengurus wilayah NU Sulsel. Dalam sambutannya KH. Ma'ruf Amin sebagai salah satu kandidat pilpres menarasikan beberapa diksi politik yang ditemukan oleh penulis, yaitu "perang ideologi". Diksi itu memiliki makna politik dalam membangun preferensi politik masyarakat NU di kota Makassar.³

Konteks kota Makassar terkait hasil pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo–Sandi memenangkannya dengan perolehan suara, sebagai berikut;

Tabel 1.3 Hasil Pilpres di Kota Makassar

No.	Pasangan kandidat	Hasil Pilpres
1	Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin	43,2%
2	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	57,8%



pengurus NU Sulawesi Selatan. Di dapatkan pada tanggal 2 Agustus 2019, pkl. 13.02

pengurus NU Sulsel sebut pilpres perang ideologi.liputan6.com.diakses 11 September l 21.00 wita.

Hasil pilpres ditingkat nasional yang memenangkan pasangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, tetapi di kota Makassar pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memenangkan pemilihan dengan defisit presentase sebesar 14% dibandingkan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, padahal ormas NU di kota Makassar memiliki basis massa yang cukup besar dibandingkan dengan ormas keagamaan lainnya.

Realitasnya kandidat 01 khususnya calon wakil presiden KH. Ma’ruf Amin merupakan ketua MUI dan menjabat sebagai Rais Aam PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama). Serta pasangan 01 ini diusung oleh partai politik yang memiliki kedekatan dengan basis *grassroot* di NU yaitu PKB dan PPP. Untuk kota Makassar berdasarkan temuan awal penulis bahwa banyak kader NU memiliki beberapa pondok pesantren seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Kekalahan politik pasangan Jokowi-Ma’ruf di kota Makassar memiliki banyak variabel, tetapi penulis akan meninjau pada segmen pemilih yang berarsiran dengan NU, yaitu santri-santri yang belajar pada pesantren yang dikelola oleh NU, umat (orangtua santri), masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren tersebut. Sebab, keberadaan seorang kandidat yang memiliki hubungan dengan NU, seperti KH. Ma’ruf Amin cenderung potensial dalam membangun preferensi dalam membentuk perilaku politik para pengelola pesantren (kiai lokal, ustad, dan guru),

santri yang berada pada naungan pesantren yang dikelola oleh NU, dan masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut. Asumsi yang



dibangun penulis menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga dakwah tidak lagi hanya berperan dalam konteks keagamaan dan pendidikan, melainkan peran politik praktik untuk kepentingan politik atau pesantren itu mengedepankan netralitas politik pada peran politik praktisnya, seperti pada pilpres 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wasisto Raharjo Jati dengan judul Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdatul Ulama menyimpulkan bahwa seharusnya ulama netral dalam urusan politik. Karena melihat bahwa ulama hanyalah simbolisasi semu pasif dalam dunia politik dimana signifikansi perannya hanya digunakan untuk mengikat loyalitas umatnya baik saat even pemilu maupun konsolidasi politik partai politik tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat pengaruh ulama dan pesantren kian luntur di mata masyarakat karena masyarakat semakin bingung dengan fenomena para ulama yang seharusnya menjadi *uswatun hasanah* justru kian bercerai berai sehingga tidak ada pegangan prinsipal yang kuat (*urwatu al wutsqo*) pada tubuh masyarakat yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku.⁴

Berdasarkan penelitian Muhammad Akbar dalam skripsinya yang berjudul Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah, Makassar menyimpulkan bahwa santri memiliki frekuensi orientasi yang relatif tinggi terhadap pengetahuan sistem politik

umum dan objek pemahaman mengenai pembuatan kebijakan

Raharjo Jati. 2012. *Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdatul Ulama*. Jurnal Vol 13, No.1 hal. 110. Diakses 5 Februari 2020.



yang dibuat oleh pemerintah dan merasa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap politik tetapi sifatnya pasif. Mereka meyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik dan juga beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem.⁵

Dari beberapa penelitian yang ada, menunjukkan bahwa peran dan pengaruh pesantren terhadap politik secara umum belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemilihan presiden. Beberapa penelitian tersebut hanya membahas terkait pilihan politik santri dan dinamika politik di NU. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variable yang digunakan pada penelitian ini adalah peran dan pengaruh pondok pesantren terhadap pilihan politik santri, umat (orang tua santri) dan masyarakat sekitar pondok pesantren, serta pendekatan yang penulis gunakan adalah pola perilaku memilih santri, umat dan masyarakat yang tidak digunakan oleh penelitian sebelumnya dan juga objek penelitian yang digunakan berbeda, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis memilih Pesantren MDIA Bontoala Makassar sebagai objek penelitian karena; 1). Pesantren MDIA Bontoala merupakan pondok pesantren yang memiliki latar belakang pendidikan

berbasis kepada pengajaran Organisasi NU. 2). Pemilik pesantren

ad Akbar.2012.*Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara diyah, Makassar*. Skripsi hal. 80



tersebut yakni KH. Abd. Muthallib yang juga merangkap menjadi pimpinan pesantren merupakan ketua pimpinan NU cabang kota Makassar yang secara tidak langsung memiliki ikatan emosional dengan salah satu calon wakil presiden yakni KH. Ma'ruf Amin, sehingga bisa saja pimpinan pesantren tersebut memobilisasi santrinya ataupun elemen pesantren untuk memilih pasangan nomor urut 01; 3). NU memiliki pondok pesantren yang lebih banyak dari organisasi Islam lainnya yang ada di kota Makassar dan juga jumlah santri pun demikian khususnya pondok pesantren MDIA Bontoala. 4). Pesantren MDIA yang terkadang mengadakan kegiatan pengajian dan mengundang warga sekitar sehingga mudah untuk melakukan mobilisasi. Adapun penelitian ini berfokus pada elit pesantren (kiai/ulama/ustadz/guru), santri, umat (orang tua santri), dan masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa potensi pasangan 01 untuk memenangkan pilpres di kota Makassar sangat besar, karena NU memiliki basis massa yang banyak di Makassar bahkan ketua umum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan pihaknya akan mendukung pasangan 01 di pilpres 2019.⁶ Namun, realitanya pasangan 02 yang memenangkan pilpres di kota Makassar. Dari Fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul skripsi: **“Pesantren dan Politik: Peran dan Pengaruh dalam Pilpres 2019 di Kota Makassar.**



Indonesia. PBNU Siap Menangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
www.balesio.com.diakses 8 Maret 2020. Pukul 12:02.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pesantren dalam mempengaruhi pilihan politik santri pada pilpres 2019 di kota makassar. ?
2. Bagaimana peran pesantren dalam mempengaruhi pilihan politik umat dan masyarakat pada pilpres 2019 di kota Makassar. ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat peran pondok pesantren dalam mempengaruhi pilihan politik santri dalam pilpres 2019 di kota Makassar.
2. Untuk melihat pengaruh pondok pesantren dalam hal ini umat (orang tua santri) dan masyarakat (sekitar pondok pesantren) dalam pilpres 2019 di kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi akademisi khususnya Program Studi Ilmu Politik mengenai nya memahami keberpihakan pondok pesantren (NU) dalam



momen politik dalam mempengaruhi pilihan politik santri, umat dan masyarakat pada pilpres 2019 khususnya dikota Makassar.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi atau penelitian terdahulu bagi penelitian selanjutnya ataupun pondok pesantren (NU) dalam mempertimbangkan dan mematangkan pilihan politik para santrinya, umat dan juga masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli maupun website banyak digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi: pendekatan institusionalisme baru, politik identitas, partisipasi politik, pengertian pondok pesanren pembahasan singkat mengenai santri, masyarakat, umat, dan kerangka pikir.

Untuk itu, penulis memulainya dengan membahas Pendekatan Institusionalisme baru. Bab ini juga menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

2.1. Pendekatan Institusionalisme Baru

Pendekatan institusional baru dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya

menyediakan kegiatan massa itu. Pendekatan institusionalisme baru



menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu dan apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran institusi berinteraksi.⁷

Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson⁸, institusi mencakup:

- (1) Struktur fisik
- (2) struktur demografis
- (3) perkembangan historis
- (4) jaringan pribadi
- (5) struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara).

Institusi timbul dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya kepentingan individu dan kepentingan bersama yang harus diwujudkan. Untuk itu masyarakat memerlukan peraturan yang stabil yang dilaksanakan dengan membentuk institusi untuk menjalankan peraturan tersebut.

Institusi memberikan stabilitas karena tidak dapat diubah begitu saja sesuai dengan kehendak hati para aktor, dan untuk dapat mengubah institusi tersebut tentunya para aktor akan memikirkan berbagai dampak yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa institusi turut menentukan pola tindakan dan sifat dari



udiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

96

97

para aktor karena ia dapat melakukan tindakan sendiri, institusi tersebut memiliki otonomi dimana ia hanya menerima input dari lingkungan kemudian membuat keputusan dan juga kebijakan.

Sebagaimana dalam pembahasan tentang kelembagaan baru dimana dalam konteks kerangka teoritis dibangun atas wawasan terbaik dari institusionalisme tradisional artinya dalam segi gerakan terdapat enam garis analisis :

- a. Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan.
- b. Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal.
- c. Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis.
- d. Dari berbicara tentang nilai menjadi pembahasan posisi kritis terhadap nilai.
- e. Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah.
- f. Dari indenpendensi menuju kemelekatan.

Inti dari Institusional baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut :

- a. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
- b. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu: a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang

peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.



- c. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
- d. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
- e. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
- f. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Menurut Hall dan Taylor⁹, sekurang-kurangnya ada tiga Cabang Institusionalisme baru yaitu Institusionalisme pilihan rasional (berakar pada ilmu ekonomi), Institusionalisme sosiologis (berakar pada sosiologi, antropologi dan budaya), dan Institusionalisme historis (berakar pada disiplin sejarah dan hukum).

Institusionalisme Pilihan rasional merupakan suatu pendekatan populer dalam arus ini menggunakan teori permainan untuk menjelaskan pengambilan keputusan. Aturan-aturan kerap kali bersaing sehingga sejumlah aktor akan mendapatkan keuntungan atas kelompok lain.

Menurut Rhodes dkk, institusi dalam pengertian ini menyediakan arena-

bagi konflik, dan upaya untuk mengubah arena-arena itu

Shiyama & Marijke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21*. (Kencana Media Group, 2013). Hal. 40



mendorong terjadinya konflik sama banyaknya jika mereka mengubah aturan permainan untuk mengubah alokasi keuntungan dan kerugian. Dari sudut pandang ini aturan-aturan tak pernah netral, tetapi sebaliknya adalah pertarungan antara penantang dan pemegang kekuasaan. Model ini mempelajari tentang bagaimana institusi menghambat rangkaian interaksi di antara para aktor, pilihan yang tersedia bagi aktor, struktur informasi dan keyakinan aktor serta ganjaran bagi individu dan kelompok. Cabang ini menekankan pada konsep efisiensi dan rasionalitas pengambilan keputusan. Pendekatan ini hadir untuk membantu menjawab pertanyaan seperti : mengapa institusi politik sangat dibutuhkan, mengapa institusi mengambil bentuk tertentu, serta mengapa institusi dapat mempertahankan dirinya dalam jangka waktu tertentu.

Cabang kedua yaitu Institusionalisme Sosiologis. Merupakan pendekatan yang berakar dari teori organisasi, antropologi dan kajian budaya. Para ahli cabang ini memandang aturan, norma, dan struktur institusi bukan secara rasional melekat atau didikte oleh asas-asas efisiensi, melainkan dikonstruksi secara budaya. Menurut Hall dan Taylor, Institusionalis sosiologis beranggapan bahwa “bahkan praktik-praktik yang tampak paling birokratis sekalipun harus dijelaskan dalam konteks budaya. Bagi Hall dan Taylor Institusionalis sosiologis mendefinisikan institusi sebagai prosedur formal atau informal, rutin, norma-norma dan

konvensi yang terikat dalam struktur-struktur organisasi dari maupun ekonomi politik.



Institusionalisme Historis, merupakan cabang ketiga yang tidak hanya digunakan oleh ilmuwan politik namun juga dalam kajian hubungan internasional. Dalam hal tertentu, Institusionalisme historis merupakan cabang yang paling keras dibanding kedua cabang sebelumnya. Cabang ini mencakup kelompok elektik dari ahli-ahli dengan berbagai dari ahli-ahli dengan berbagai agenda penelitian yang luas. Pendekatan ini banyak membahas tentang *decision trees* dan *path dependence*. *Term* yang berarti efek suatu keputusan akan membatasi pilihan yang tersedia pada masa depan bagi setiap aktor politik atau institusi politik. Institusionalisme historis mengakui pentingnya ide dalam menciptakan perubahan politik, disamping peranan variabel ekonomi atau kebudayaan dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Sanders, bagi Institusionalis historis yang menjadi minat utama adalah konstruksi, pemeliharaan dan adaptasi institusi.

Meski sukar menunjukkan defenisi yang tepat mengenai pendekatan Institusionalis historis, ada beberapa unsur umum dalam pemikiran ini, Pierson dan Skocpol¹⁰ mengemukakan tiga karakter penting pendekatan ini. Pertama, Institusionalis historis mempertanyakan hal besar, substantif, yang merupakan minat publik yang luas maupun kalangan ilmiah. Kedua, Institusionalis historis memperhatikan waktu secara serius untuk menelusuri perubahan-perubahan dalam politik dan

sepanjang sejarah. dalam hal ini fokus kajiannya yakni isu-isu

. 41-42



perkembangan institusional. Ketiga, para ahli Institusionalis historis menaruh perhatian pada konteks dan konfigurasi yang memungkinkan mereka untuk berhipotesis mengenai kombinasi efek institusi dan proses, dengan kata lain Institusionalis historis biasanya tidak hanya menguji satu Institusi atau proses pada suatu saat dalam waktu melainkan mereka cenderung memandang politik sebagai seperangkat proses yang kompleks dan institusi yang berubah sepanjang waktu, yang berinteraksi dalam cara yang menarik dan tidak terduga.

2.2. Konsep Institusionalisme Baru

a. Keterlibatan Elit

Institusionalis historis melihat bagaimana pilihan yang dibuat tentang desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi pembuatan keputusan individu di masa depan.¹¹ Dalam kaitan dengan keterlibatan elit, konsep institusionalis baru menunjukkan adanya keterkaitan. Hal ini dapat di lihat dari pemahaman pada konsep institusionalis historis. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa sistem pemerintah memberi pengaruh pada perilaku individu di masa yang akan datang. Artinya dalam konsep ini perilaku individu tidak dapat lepas dari sistem pemerintah.



Marsh & Gerry Stocker, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik (tujuh cabang institusionalisme baru)*. Edisi 2 cetakan ke-9, Hal. 115

b. Bentuk Pengaruh

Institusionalis Sosiologis mempelajari cara institusi menciptakan makna bagi individu, memberi titik pijakan teoritis yang penting bagi institusionalisme normatif dalam ilmu politik. Dalam kaitan dengan bentuk pengaruh, konsep institusionalis baru menunjukkan adanya keterkaitan. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman pada konsep institusionalis sosiologis. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa institusi menciptakan makna bagi individu, memberikan titik pijakan teoritis yang penting bagi institusionalisme normatif dalam ilmu politik. Artinya dalam konsep ini perilaku individu tidak terlepas dari bentuk pengaruh yang diberikan oleh institusi.

c. Metode Perilaku

Institusionalis Normatif mempelajari bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam institusi politik membentuk perilaku individu. Terkait dengan metode perilaku ini sangat terkait dengan institusionalis normatif. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan institusionalis normatif yang menyatakan bahwa bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam institusi politik dapat mempengaruhi bentuk perilaku dari setiap individu. Artinya dalam konsep ini, perilaku individu tidak terlepas peran institusi dalam memberikan pemahaman norma dan nilai pada setiap



2.3. Politik Identitas

Istilah politik identitas dalam perkembangannya di definisikan dalam berbagai pengertian yang berbeda, namun merujuk pada spirit perjuangan yang sama. Istilah sering di pertukarkan dalam dua terminology, yaitu *identity politics* atau *politics of identity*. Keduanya merujuk kepada berbagai mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya sering di sembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih perogresif. Beberapa di antara istilah penyebutan yang memiliki spirit perjuangan yang sama dengan politik identitas adalah politik perbedaan (*politics of difference*), politik pengakuan (*politics of recognition*), dan politik multikulturalisme (*politics of multiculturalism*).

Pada dasarnya semua rangkaian istilah tersebut memahami pentingnya identitas sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan politik. Dalam hal ini, identitas dipahami tidak hanya sebagai ruang kosong tanpa penanda, tapi representasi dari keberadaan sebuah kelompok identitas yang mesti diakui dan dihargai.

Pelabelan politik identitas pada dasarnya merujuk kepada kolektif bukan sekedar individu, dan public bukan sekedar privasi, sebuah kelompok bukan sekedar pengelompokkan, yang berkembang untuk menuntut pengakuan (*recognition*) dan legitimasi, bukan hanya sekedar



ekspresi atau otonomi. Kauffman memahami politik identitas sebagai visi dan praktik dari politik radikal. Menurutnya, politik identitas bukan hanya persoalan klaim atau pengakuan terhadap identitas, tapi juga terkait dengan keterlibatan langsung dengan kelompok dan institusi yang telah mendukung diskriminasi. Gerakan politik identitas yang muncul diberbagai belahan dunia dipahami sebagai bentuk ekspresi yang dilakukan oleh kelompok identitas untuk memperoleh pengakuan maupun legitimasi.

Dalam definisi klasik, politik identitas dipahami sebagai partisipasi individu-individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Terkait dengan aspek politis, pembentukan identitas menurut Castell dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu; pertama, identitas pelegitimasi (*legitimizing identity*), merupakan identitas sah yang digunakan institusi resmi untuk merasionalisasikan tindakannya; kedua, identitas resisten (*resistance identity*), merupakan identitas yang terbentuk karena tekanan dan ancaman akibat adanya diskriminasi maupun stereotype oleh pihak lain yang berkuasa dan dominan; dan ketiga, identitas proyek (*project identity*), merupakan identitas yang terbentuk ketika actor social membangun identitas baru yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan mentransformasikan posisi struktur social mereka.

Dalam tulisan Stanley Aronowitz tentang "The Politics Of Identity: Class, Culture and Politics Identitas lama (old politics of identity) yang isu-

fokus pada nilai lama modernitas-industrialisme dalam system pasar dengan sebuah Negara liberal yang menggaransikan



demokrasi parlementariat dan hak-hak individu dimana identitas diarahkan untuk tujuan politis melalui kepentingan dan posisi ekonomi. Kelas pada dasarnya masih menjadi basis untuk mengidentifikasi terbentuknya identitas dan munculnya gerakan social politik. Kedua, politik identitas baru (new politics of identity), yang fokusnya pada politik baru yang terkait dengan identitas-identitas ras, gender, maupun agama. Pada dasarnya, perbedaan tersebut tampak pada isu-isu yang menggerakkan gerakan social politik dalam perkembangan sejarah.

Beberapa ilmuwan sosial yang mencoba mendefinisikan politik identitas di antaranya adalah Iris Marion Young menjelaskan bahwa politik identitas merupakan mode of organizing yang terhubung secara intimasi dengan berbagai kelompok lainnya yang sama-sama mengalami represi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Todd Gitlin bahwa politik identitas adalah perjuangan untuk mengubah warna dari ketidaksetaraan. Senada dengan pendapat Dalglish bahwa politik identitas adalah upaya untuk mengatasi kekosongan representasi politik, atau dalam hal ini bentuk politik politik yang berupaya untuk mentransformasikan berbagai preferensi dalam kebijakan-kebijakan dengan mengkoneksikan mereka ke dalam institusi-institusi representative tanpa menggunakan kekerasan langsung. Dalam sketsa beragam definisi tersebut, Castell dan Miller, Pfaff, dan Kymlicka, menjelaskan bahwa politik identitas atau politik

an sedikitnya dipicu oleh menyeruaknya terus-menerus



mengelaborasi identitas particular, baik dalam relasi seksual, maupun identitas-identitas primordial seperti bangsa, etnis dan bahkan agama.

Secara filosofis, kehadiran politik identitas ini menurut Hegel terkait erat dengan pengakuan terhadap kelompok tertentu. Bagi Hegel, tanpa pengakuan berarti sebuah opresi. Pengakuan adalah prasyarat penting dari eksistensi sebuah kelompok identitas. Pengakuan tersebut datang baik dari Negara maupun kelompok identitas lainnya. Untuk itu, politik pengakuan (*politics of recognition*) memainkan peran krusial dalam arena politik untuk menghapus berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain, politik pengakuan (*politics of recognition*) adalah politik identitas itu sendiri. Dengan nada yang sama, Charles Taylor menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pengakuan, yaitu sebagai kebutuhan (*need*), dan sebagai tuntutan (*demand*). Sebagai sebuah kebutuhan (*need*), pengakuan merupakan suatu yang telah diperoleh dan di berikan oleh Negara maupun kelompok lain. Sedangkan sebagai sebuah tuntutan (*demand*), pengakuan dianggap sebagai sesuatu yang belum didapatkan sehingga membutuhkan perjuangan dan perlawanan untuk mengembalikan ataupun mendapatkan pengakuan tersebut.

Menurut Kwame Anthony Appiah, terdapat tujuh cara berbeda untuk menjelaskan politik identitas, yaitu: *Pertama*;

terdapat konflik politik mereka yang berada di dalam dan di luar, *Kedua*; para politisasi mobilisasi identitas, *Ketiga*; Negara bisa memperlakukan orang-



orang yang memiliki identitas secara berbeda, *Keempat*; rakyat bisa mengejar politik pengakuan, *Kelima*; menjadi micropolitik social yang memaksakan norma-norma dalam pengidentifikasian, *Keenam*; adanya identitas politik yang secara inherent sama dengan pengidentifikasian partai, *Ketujuh*; kelompok social bisa memobilisasi untuk merespon secara kolektif terkait dengan semua hal di atas. Pandangan tersebut dengan demikian, secara eksplisit menjelaskan cara dimana identitas di pahami sebagai sesuatu yang politis (political), dan bahwa identitas merupakan merupakan sebuah interrelasi yang tak bisa di pisahkan dari berbagai aspek lainnya apatalagi aspek politik.¹²

2.4. Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik dalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbiving dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.



achdani Afala. *Politik Identitas Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2018). Cetakan al.13-17

Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa: “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.”

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tumpuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan yang absah oleh rakyat.¹³



367-368

2.5. Pesantren

Pesantren pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang *multifaset*¹⁴ dan karena itu pula, sehingga memiliki banyak fungsi yang beragam. Misalnya melihat pondok pesantren sebagai lembaga tradisional yang mengemban fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.¹⁵ Sementara itu pendapat lain menyebutkan adanya tiga fungsi pondok pesantren yaitu, fungsi transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, fungsi pemeliharaan tradisi Islam dan fungsi reproduksi ulama.¹⁶

Gambaran yang rinci mengenai pondok pesantren dikemukakan oleh pakar lain tentang pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial.¹⁷ Sebagai institusi sosial, pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika bagi masyarakat, karena pesantren adalah institusi yang melegitimasi berbagai moralitas yang seharusnya ada dalam masyarakat. Karena institusi sosial hakekatnya muncul dan berkembang berkat tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai institusi sosial tersebut, fungsi pondok pesantren meliputi: (1) sebagai sumber nilai dan moralitas, (2) sebagai pendalaman nilai dan ajaran keagamaan, (3) sebagai pengendali-filter bagi perkembangan moralitas dan kehidupan

¹⁴ Multifaset merupakan pengertian dari bersegi banyak; beraneka segi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, definisi Multifaset*. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/multifaset> diakses 1 Agustus 2019, pkl. 20:17 WITA

Shi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Balasain dkk. (Jakarta: P3M 1987), Hal. 232-

Nata (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001), Hal. 112

n, *Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren* dalam A. Halim dkk. (ed.), *Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hal. 78



spiritual, (4) sebagai perantara kepentingan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, (5) sebagai sumber fraksis dalam kehidupan.¹⁸ Dalam tulisannya yang lain, disebutkan juga fungsi pondok pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat.¹⁹ Namun, diatas segalanya pondok pesantren memainkan peran sebagai lembaga dakwah.²⁰

Pada penelitian ini, pesantren yang akan penulis jadikan sebagai tempat penelitian ada 2 yakni; 1. Ponpes MDIA Bontoala yang terletak di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Tua. 2. Ponpes An-Nadlah Makassar yang berlokasi di Jalan Tinumbu dalam, lorong 4, Kecamatan Bontoala, Kelurahan Baraya Makassar.

2.6. Santri

Pengertian santri digunakan untuk menunjuk pada golongan orang-orang Islam di Jawa yang memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran-ajaran agamanya sedangkan untuk orang-orang yang lebih mengutamakan tradisi kejawaannya biasanya disebut kaum “abangan”. Mengenai asal-usul perkataan “santri” ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan. Pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwa “santri” itu berasal dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sansakerta, yang artinya melek huruf. Agaknya dulu, lebih-lebih pada

¹⁸ Ibid, Hal. 79

m, *Pengembangan Komunitas Pesantren* dalam Moh. Azis dkk. (ed.), *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 31

Hasyim, *Peranan dan potensi Pesantren dalam Pembangunan* dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, (ed.), *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, Terj. Sonhaji Saleh (Jakarta: P3M, 1988), Hal. 91



permulaan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Demak, kaum santri adalah kelas “leterary” bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi tahu agama (melalui kitab-kitab tersebut). Atau paling tidak seorang santri itu bisa membaca Al-Qur’an yang dengan sendirinya membawa pada sikap lebih serius dalam memandang agamanya.

Kedua, adalah pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, persisnya dari kata cantrik, yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru ini pergi menetap. Tentunya dengan tujuan didapat darinya mengenai suatu keahlian. Sebenarnya kebiasaan cantrik ini masih bisa kita lihat sampai sekarang, tetapi sudah tidak “sekental” seperti yang pernah kita dengar. Misalnya, seseorang yang hendak memperoleh kepandaian dalam pewayangan, menjadi dalang atau manabuh gamelan, dia akan mengikuti orang lain yang sudah ahli, dalam hal ini biasanya dia disebut “dalang cantrik”. Sebab dulu, dan mungkin juga sampai sekarang, tidak terdapat cara yang sungguh-sungguh dan “profesional” dalam mengajarkan kepandaian-kepandaian tersebut. Pemindahan kepandaian itu, sebagaimana juga dengan pemindahan obyek kebudayaan lain pada orang Jawa “abangan”, lebih banyak melalui pewarisan langsung dalam

man sehari-hari.²¹

Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*. Dian Rakyat. Jakarta, hal. 21-22



Ada pun santri berdasarkan penelitian ini adalah para siswa/siswi yang sedang belajar di pondok pesantren dan sudah menduduki kelas tiga Madrasah Aliyah atau setara dengan SMA yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu, khususnya pada pilpres 2019 di kota Makassar.

2.7. Umat

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengertian umat adalah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama.²² Sehingga ketika berbicara mengenai umat, maka tidak bisa terlepas dari sebuah kepercayaan atau agama yang dipeluk atau dianut oleh setiap orang. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa umat adalah kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama. Lebih jauh, penggunaan kata ummah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus, yaitu para penganut agama dan pengikut agama tertentu, seperti umat Islam, umat Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam. dan dapat pula bersifat umum, yaitu setiap generasi manusia adalah umat yang satu, dan sekalian bangsa manusia disebut umat manusia, tanpa batasan agama (aqidah).²³



an Umat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://www.kbbi.co.id/arti->
diakses 17 Februari 2020, pkl. 09:58 WITA
n, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, hal. 74

Ada pun menurut penelitian ini, yang di maksud dengan umat adalah para orang tua santri yang menjadi menjadi kader maupun simpatisan dari Ormas NU.

2.8. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama:--*terpelajar*.²⁴ Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “sociuc” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.²⁵ Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.²⁶ Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.²⁷

Jika mengacu pada penelitian ini, maka yang di maksud masyarakat adalah orang-orang yang tinggal di sekitaran pondok

²⁴ Pengertian Masyarakat. *Kamus Bahasa Indonesia Online*. <https://www.kbbi.co.id/arti-masyarakat>, diakses 17 Februari 2020, pkl. 10:15 WITA

Maningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157
Sudar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco), hlm. 63

Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1971), hlm. 11



pesantren dan sudah mengetahui seluk-beluk atau sejarah pesantren tersebut baik penduduk asli maupun pendatang dan sudah menetap lama di lingkungan pondok pesantren.

2.9. Kerangka Pikir

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial. Tapi pada pemilu yang lalu ada kecenderungan pesantren untuk ikut berpolitik. Hal ini di pengaruhi oleh dua hal, yakni satu di pengaruhi oleh regulasi dan yang satu di pengaruhi oleh elit. Berdasarkan dua pengaruh itu kemudian ada metode untuk membentuk model perilaku, dan model perilaku ini di arahkan kepada 3 aspek yakni umat, santri dan masyarakat yang pada tujuannya mengarah pada penentuan sikap pada pilpres 2019 kemarin di kota Makassar.

Variabel-variabel yang akan digunakan oleh penulis yaitu, tentang kebijakan internal Pesantren, pengaruh keterlibatan elit serta metode praktis dalam pelaksanaan kinerja pesantren yang mempunyai keterkaitan dengan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun skema dari kerangka pikir adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

